



ANALISIS PENGANGGURAN DAN PERLUASAN EKONOMI DI INDONESIA AKIBAT PANDEMI COVID-19

Lilian Nurul Wildani¹, Eva Awaliya², Goharwin³, Nindi Suhendri⁴

Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Internasional Batam

Corresponding author : evaawaliya0200@gmail.com

ABSTRACT

Purpose. *The purpose of this study is to analyze the unemployment rate in Indonesia caused by the Covid-19 pandemic in 2021 and 2022.*

Methods. *In making articles, researchers use research methods, in the process of collecting data without going directly to the field, but taking reference sources that can support this research.*

Findings. *The research method used is quantitative research. One indicator of the success of a country's development is the unemployment rate.*

Implication. *Not only is the government's role in overcoming unemployment during the COVID-19 period, but the role of entrepreneurs and the community in overcoming the pandemic is also very much needed. It depends on people's concern to rise from the economic crisis that has caused a downturn in a not short time.*

Keywords. *Unemployment; Covid-19; Government Policy*

ABSTRAK

Tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pengangguran di Indonesia akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2021 dan 2022.

Metode. Dalam pembuatan artikel peneliti menggunakan metode penelitian, dalam proses pengumpulan data tanpa terjun langsung ke lapangan, melainkan mengambil sumber referensi yang dapat mendukung penelitian ini.

Hasil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara adalah tingkat pengangguran.

Implikasi. Tidak hanya peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran di masa COVID-19, peran pengusaha dan masyarakat dalam mengatasi pandemi juga sangat dibutuhkan. Tergantung kepedulian masyarakat untuk bangkit dari krisis ekonomi yang menyebabkan keterpurukan dalam waktu yang tidak singkat.

Kata Kunci. Pengangguran; Covid-19; Kebijakan Pemerintah.

1. Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, Indonesia tentu memiliki tantangan dalam mengatasi pengangguran. Salah satu indikator yang mempengaruhi pendapatan dan kekayaan suatu negara adalah pengangguran. Oleh karena itu, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sukses diperlukan kajian kritis terhadap kepuasan kerja yang masih sangat rendah (Fikri, 2021). Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari berbagai indikator. Salah satu indikator keberhasilan itu adalah tingkat pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang telah tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya (Krisnandika et al., 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak Covid-19 yang pertama kali muncul pada Februari 2020. Akibat pandemi tersebut, banyak kematian yang dialami negara tersebut, dan Indonesia menempati urutan ketiga dengan jumlah kematian tertinggi di Asia (Krisnandika et al., 2021). Pendapatan Indonesia turun, nilai tukar rupiah melemah, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat akibat PSBB yang membatasi aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi (Siti Indayani, 2020). Oleh karena itu, pelemahan pembangunan ekonomi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja Indonesia yaitu bertambahnya jumlah pengangguran.

Berdasarkan laporan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2020, tingkat pengangguran pada tahun 2022 akan lebih tinggi dibandingkan krisis pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh ledakan COVID-19 yang melanda dunia. OECD mencatat tingkat pengangguran pada Februari 2020 sebesar 5,2%, kemudian pada Mei 2020 terjadi peningkatan menjadi 8,4% (Statistik, 2020). Kondisi di negara berkembang khususnya di Indonesia, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia maka tingkat pengangguran juga meningkat. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2022), tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2021 tercatat 11,53 juta orang (5,53%) di Indonesia yang terdampak Covid-19. Sebanyak 0,55 juta orang tergolong pengangguran akibat Covid-19, sedangkan penduduk yang tidak bekerja akibat Covid-19 sebanyak 0,58 juta orang, dan penduduk yang bekerja mengalami pengurangan jam kerja akibat Covid-19 sebanyak 9,44 juta orang.

Perekonomian Indonesia terpuruk akibat wabah virus Corona mulai tahun 2019. Virus Covid-19 tampaknya berdampak pada semua industri, terutama pariwisata. Tahun ini, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun menjadi 5,4% (Edwardus Iwantri Goma, 2021). Munculnya virus Covid-19 sangat berdampak pada angka pengangguran di Indonesia. Pada Februari 2022, komposisi angkatan kerja terdiri dari 135,61 juta orang dan 8,40 juta orang yang menganggur. Jika dibandingkan dengan Februari 2021, angkatan kerja bertambah 4,20 juta orang, penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang dan pengangguran berkurang 0,35 juta orang (Angga Setyo Darmawan, 2022).

2. Kajian Pustaka dan Hipotesis Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Letida, 2017). Pengangguran dapat terjadi karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya pekerjaan yang diberikan melebihi banyaknya

pekerjaan yang diminta. Untuk memetakan dan menganalisis ketenagakerjaan di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menerapkan pendekatan angkatan kerja yang diperkenalkan oleh International Labour Organization (ILO, 2005). Dalam metode ini, umumnya penduduk suatu negara dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pekerja (tenaga kerja) dan bukan pekerja. Yang tergolong pekerja adalah penduduk yang termasuk dalam batas usia kerja. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimal 15 tahun sampai dengan 56 tahun dan akan terus bertambah 1 tahun untuk 3 tahun berikutnya sampai mencapai batas usia 65 tahun (Latief, 2013).

Jenis Pengangguran (Hanifa, 2021), Pengangguran sering diartikan sebagai orang yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terdiri dari 3 jenis, yaitu: Pengangguran Terselubung (Pekerja yang tidak bekerja maksimal karena alasan tertentu), Pengangguran Terselubung (Buruh kurang dari 35 jam per minggu), dan Pengangguran Terbuka (Pekerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan). Penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori pengangguran dapat ditentukan dengan melihat tingkat pengangguran terbuka. Rasio jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja digunakan untuk menghitung tingkat pengangguran. Rasio jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja, yang dinyatakan dalam persentase, dapat digunakan untuk menghitung tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah.

$$TPT = \text{Jumlah Pengangguran} / \text{Jumlah Tenaga Kerja} \times 100$$

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Sebagian dari mereka ada yang menganggur karena belum mendapat pekerjaan padahal sudah berusaha mencari dan ada juga yang malas mencari kerja.

Dampak pengangguran (Franita, 2019) terhadap menurunnya tingkat perekonomian negara berdampak pada ketidakstabilan politik. Ini memberikan dampak pada investor, secara sosial dan mental. Banyak dampak dari pengangguran: Dari segi ekonomi, pengangguran akan menambah jumlah penduduk miskin. Dari segi sosial, jumlah pengangguran akan meningkat, dan jumlah pengemis, gelandangan, dan pengamen akan meningkat. Dilihat dari segi mental, dengan banyaknya pengangguran, rendahnya rasa percaya diri, putus asa, dan akan berujung pada depresi. Dari sudut pandang politik, akan ada banyak demonstrasi. Dari segi keamanan, banyak pengangguran yang melakukan tindakan kriminal untuk menopang ekonomi mereka, seperti merampok, mencuri, menjual narkoba, dan penipuan.

Dengan banyaknya dampak pengangguran yang muncul, maka menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk segera mengatasi banyaknya pengangguran yang terjadi. Pemerintah harus meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Setiap daerah harus mampu mandiri dalam meningkatkan laju perekonomiannya.

Pertumbuhan ekonomi

Perkembangan keuangan merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai pergantian peristiwa atau kemajuan suatu negara. (Rasyida, 2021) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya karena penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis yang dibutuhkannya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan syarat utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi.

Dalam pengertian ekonomi makro (Fahmi Faisol, 2011), pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB yang juga berarti penambahan Pendapatan Nasional (Y). PDB digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional sedangkan di tingkat daerah menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDB terdiri dari beberapa komponen yaitu konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G), dan ekspor neto (NX) (Nuraini & Rouf, 2020). Komponen tersebut ditunjukkan pada identitas pos pendapatan sebagai berikut:

$$PDB = C + I + G + NX$$

Selain kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah juga dapat memerangi inflasi dengan kebijakan moneter atau nonfiskal seperti meningkatkan output, memfasilitasi impor barang, menstabilkan pendapatan (upah) masyarakat, menetapkan harga maksimum, serta memantau dan mendistribusikan barang. Seperti Bank Indonesia yang diamanatkan untuk menciptakan dan menjaga stabilitas rupiah. Bank Indonesia mengadopsi Inflation Targeting Framework (ITF) sebagai kerangka kebijakan moneternya (Dinamika, 2020). Dalam komunikasi yang efektif, efektivitas kebijakan moneter dapat ditingkatkan, terutama pada periode ketidakpastian yang meningkat. Melalui persamaan di atas diketahui bahwa rumah tangga mengkonsumsi sebagian output perekonomian, perusahaan dan rumah tangga menggunakan sebagian outputnya untuk investasi, dan pemerintah membeli sebagian outputnya untuk kepentingan umum.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran

Para ekonom percaya bahwa faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang berpotensi mempengaruhi pengangguran. Arthur Okun adalah salah satu pembuat kebijakan ekonomi Amerika yang paling kreatif di era pasca perang (Astari, 2019). Pada tahun 1962, ia menyusun hubungan empiris antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi (PDRB). Dari hasil hubungan empiris tersebut, diindikasikan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran. Apabila perekonomian mengalami pertumbuhan maka permintaan dan penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Artinya jika tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi maka jumlah pengangguran akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi menurun maka tingkat pengangguran akan meningkat. Hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran ini dikenal dengan hukum Okun, diambil dari nama ekonom Arthur Okun yang pertama kali mempelajarinya (Fuada & Jurdil, 2021).

Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga-harga umum secara terus menerus. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa satu atau beberapa kenaikan pada waktu tertentu dan hanya bersifat “sementara” belum tentu menyebabkan inflasi. Gejala kenaikan umum yang cepat atau tinggi selama periode waktu tertentu disebut keadaan inflasi. Tingkat inflasi sebagai salah satu indikator kestabilan ekonomi selalu menjadi fokus perhatian masyarakat. Setidaknya penurunan tingkat inflasi mencerminkan gejolak ekonomi di suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi jelas merupakan hal yang sangat merugikan perekonomian negara. Situasi ekonomi yang tidak menguntungkan atau buruk telah mendorong tingkat inflasi menjadi tinggi dan pada akhirnya akan menjadi bencana bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Definisi singkat inflasi adalah kecenderungan harga-harga yang naik secara umum dan terus menerus. Jika kenaikan harga tidak mempengaruhi sebagian besar harga komoditas lain, itu tidak dianggap inflasi jika hanya mempengaruhi satu atau dua item. Ketika ada ketidakseimbangan antara penawaran produk dan permintaan akan barang-barang tersebut, seperti ketika permintaan melebihi penawaran, maka akan terjadi inflasi. Semakin besar kesenjangan, semakin besar ancaman inflasi terhadap kesejahteraan ekonomi suatu negara. Peningkatan jumlah total uang yang harus dibayar (nilai satuan moneter hitung) untuk produk, komoditas, dan jasa, menurut ekonom modern awal, disebut sebagai inflasi. Sebaliknya, apa yang terjadi disebut deflasi ketika nilai moneter barang, komoditas, dan jasa menurun.

Dari definisi tersebut, terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan terjadi inflasi, yaitu sebagai berikut (Malik et al., 2021) : Harga meningkat, harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi dari harga periode sebelumnya. Secara umum, kenaikan harga suatu barang tidak dapat disebut inflasi jika kenaikan itu tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Berlangsung terus menerus, kenaikan harga secara umum juga tidak akan menyebabkan inflasi jika hanya terjadi sesaat, oleh karena itu penghitungan inflasi dilakukan dalam jangka waktu minimal bulan.

Jenis inflasi yang dikategorikan menurut intensitasnya adalah sebagai berikut (Wicaksono & Uluwiyah, 2020): Hiperinflasi (>100%), Inflasi Tinggi (30%-100%), Inflasi Sedang (10%-30%), Inflasi Ringan (< 10%)

3. Metode Penelitian

Dalam pembuatan artikel ini, metode penelitian digunakan dalam proses pengumpulan data tanpa terjun langsung ke lapangan, melainkan mengambil sumber referensi yang dapat mendukung penelitian ini. Dengan mengestimasi besarnya pengaruh sejumlah variabel ekonomi makro terhadap kondisi ekonomi makro dengan menggunakan mobilitas penduduk dan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19, yang berubah setiap hari hingga saat ini, sebagai variabel penjelas, maka dimungkinkan untuk mengukur dampak dari pandemi terhadap kondisi ekonomi makro.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metodologi yang digunakan peneliti untuk menguji teori tentang sikap dan perilaku seseorang berdasarkan bukti numerik dan statistik. Teknik pengumpulan data meliputi pencarian informasi penting dengan cara menganalisis data melalui reduksi data, visualisasi data, dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan pemahaman atas hasil argumentasi yang relevan dengan penelitian literatur yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.

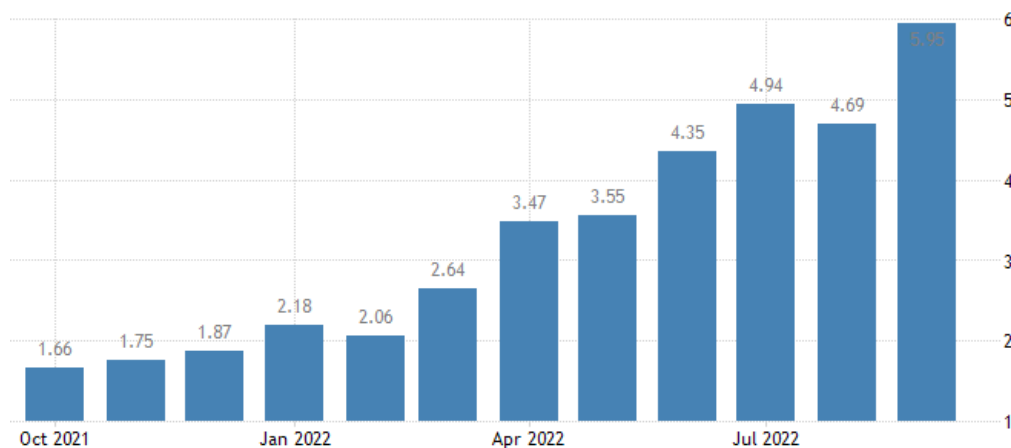
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Salah satu indikator ekonomi yang mempengaruhi pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi negara. Jika kondisi pertumbuhan ekonomi negara tersebut mengalami percepatan, maka akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran. Namun seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi di semua negara, terutama di Indonesia, mengalami perlambatan dan penurunan yang sangat dalam beberapa tahun terakhir. Penyebab utama hal ini terjadi adalah karena adanya pandemi Covid-19 yang sama sekali tidak diprediksi sebelumnya. Artinya, jika kondisi pertumbuhan ekonomi melemah, maka

akan sangat mempengaruhi jumlah pengangguran (Susilawati et al., 2020). Berikut data pengangguran di Indonesia tahun 2020-2022 berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS):

1. Tahun 2020, pengangguran bertambah 60 ribu orang, berbeda dengan TPT yang turun menjadi 4,99% pada Februari 2020.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2021 sebesar 6,26 persen, turun 0,81 poin persentase dibanding Agustus 2020.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86%, turun 0,63% poin dibandingkan Agustus 2021.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Indonesia mengalami peningkatan jumlah pengangguran selama pandemi. Dampak pandemi Covid-19 masih terasa hingga saat ini, dimana inflasi Indonesia tahun 2022 akan mencapai 5,71%. Ketika perekonomian terlihat melambat dari seharusnya yang ditandai dengan **pertumbuhan pengangguran** yang tinggi, kebijakan fiskal dan moneter yang tepat harus segera diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan mengurangi pengangguran secara bertahap (Indayani & Hartono, 2020).



Grafik 1 Inflasi Indonesia 2021-2022

Sumber: Statistik Indonesia & Bank Indonesia

Teori Keynesian menjelaskan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Fakta ini membenarkan bukti empiris dari beberapa penelitian tentang hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi bahwa inflasi yang tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun (Manopo, 2017). Jika kita melihat grafik inflasi Indonesia tahun 2021-2022, tingkat inflasi di Indonesia akan terus meningkat drastis. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurun. Namun, tingkat inflasi tahun 2021-2022 di Indonesia tergolong inflasi yang ringan jika dibandingkan dengan negara lain.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur dengan naik atau turunnya produk domestik bruto (PDB) negara tersebut melalui PDB tingkat pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perekonomian Indonesia tumbuh melambat sebesar 2,97% (year on year) dibandingkan triwulan I tahun 2020. Dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat sebesar 2,41% (Ishak & Sy, 2017).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara melambat karena daya beli masyarakat menurun. Daya beli penduduk sangat penting karena merupakan komponen yang digunakan sebagai alat untuk mengukur biaya pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut menjadi faktor perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2020. Kebijakan PSBB untuk menahan penyebaran virus corona baru berdampak pada permintaan domestik karena pandemi membatasi pergerakan dan aktivitas masyarakat. Berkurangnya pendapatan warga sekitar akibat pandemi memaksa banyak unit usaha untuk menabung atau tutup operasional. Pembatasan ini otomatis menyebabkan pengangguran meningkat drastis.

Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Pengangguran di Masa Pandemi Covid-19 Dapat dipahami bahwa satu negara tidak dapat selalu bergantung pada negara lain akibat pandemi Covid-19. Selain itu, untuk lebih meminimalkan ketergantungan pada produsen dan industri asing, khususnya di bidang-bidang penting yang strategis seperti makanan dan obat-obatan, pemerintah harus lebih menekankan peningkatan daya saing produsen dan industri dalam negeri. Pemerintah dan perusahaan harus membuat rencana darurat untuk kondisi tak terduga setelah belajar dari pandemi. Pembaharuan struktur ketenagakerjaan nasional juga diperlukan, misalnya dengan mengadopsi program jaminan sosial sebagai langkah penghematan tenaga kerja di masa pandemi. Untuk mengurangi dampak krisis kesehatan di masa depan, sangat penting untuk menerapkan program strategis ini. (Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, 2009)

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan langkah preventif untuk mengatasi masalah pengangguran akibat pandemi Covid-19 di dunia kerja. Cakupan ini khusus untuk pasar tenaga kerja dan lembaga pasar tenaga kerja, dengan tujuan mengatasi pengangguran. Berikut peraturan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah pengangguran terutama akibat pandemi Covid-19 (Wilanda. Putu, 2019):

1. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 termasuk stimulus fiskal bagi pelaku ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar pemilik usaha tetap dapat mengelola usahanya sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berujung pada peningkatan angka pengangguran (Fitri, 2021).
2. Menawarkan berbagai program konsolidasi keuangan termasuk insentif pajak keuntungan, pembayaran sisa hipotek atau skor kredit, dan aturan kontribusi jaminan sosial tempat kerja lainnya untuk membebaskan sekitar 56 juta karyawan tetap di lingkungan tersebut.
3. Berikan perlindungan sosial online untuk pekerja lepas. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja kasar di sekitarnya, yang tergolong miskin dan rentan.
4. Mengutamakan pemberian insentif pendidikan melalui program kartu prakerja kepada pegawai yang terkena PHK. Pemerintah telah memberikan insentif pendidikan dengan target mencapai 3,5 hingga 5,6 juta penerima manfaat pada tahun 2020. Hingga saat ini diketahui lebih dari 680.000 penerima manfaat sebagian besar menjadi korban PHK.
5. Meningkatkan kesempatan kerja melalui program ekstensif antara lain Cash Deep Drawing, Effective Deep Drawing, Teknologi Tepat Guna (TTG), Kewirausahaan Mandiri (TKM), dan Kewirausahaan, untuk menarik tenaga kerja.
6. Memberikan pembinaan terhadap keamanan dan kelangsungan usaha, serta keselamatan karyawan jika terpapar Covid-19.

7. Pemerintah melakukan stabilisasi harga pangan di tengah pandemi COVID-19 yang dimulai pada Maret-Juli 2021. Pemerintah telah melibatkan beberapa pengusaha dari berbagai sektor yang bergerak di sektor riil untuk memastikan bahan baku pangan tetap tersedia sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. terjangkau (Rizal & Mukaromah, 2021).

Tidak hanya peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran di masa COVID-19, peran pengusaha dan masyarakat dalam mengatasi masa pandemi juga sangat dibutuhkan. Tergantung kepedulian masyarakat untuk bangkit dari krisis ekonomi yang menyebabkan keterpurukan dalam waktu yang tidak singkat. Sebagai masyarakat yang berjiwa wirausaha, COVID-19 merupakan peluang untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi sejak awal tahun 2020. Berikut beberapa cara untuk pulih dari pandemi:

Melakukan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) melalui pelatihan kewirausahaan pengecatan kendaraan bermotor. Program Kreativitas Mahasiswa adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa di perguruan tinggi agar di masa mendatang dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta memperkaya budaya bangsa (Umbu et al., 2021).

Berbagai mitra tentunya telah mempersiapkan berbagai risiko yang tidak terduga seperti COVID 19 yang menyerang seluruh dunia. Dampak dari pandemi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap keadaan ekonomi suatu perusahaan. Hal ini mengakibatkan pengurangan yang signifikan dalam tenaga kerja karena penyakit yang menyebar cepat. Selain itu, banyak perusahaan membuka lowongan kerja untuk pulih dari krisis ekonomi. Salah satunya adalah mitra Pemuda GMT Kota Baru yang mengadakan pelatihan bagi para pemuda yang kehilangan pekerjaan. Kegiatan PKM ini akan menerapkan transfer teknologi melalui pelatihan wirausaha pengecatan kendaraan bermotor. Hal itu dilakukan agar generasi muda memiliki jiwa wirausaha dan keterampilan yang memadai untuk dapat membuka usaha sendiri. Pengabdian berupa pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020 (Umbu et al., 2021)

Pemberdayaan melalui toko online, Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak pemilik yang memanfaatkan media sosial sebagai tempat berjualan. Banyak pemilik yang mengajak beberapa ibu rumah tangga sebagai reseller untuk mendapatkan penghasilan. Melalui toko online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya menjadi wadah bagi para reseller untuk menjual produknya tanpa harus bertemu langsung dengan pembeli (Fuada & Jurdil, 2021). Selama masa pandemi, pelanggan tetap dapat membeli produk yang diinginkan dari toko di online shop. Reseller juga bisa berjualan jarak jauh dan tetap untung secara ekonomi.

5. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu kurangnya sampel yang dapat diperoleh dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Manfaat yang diharapkan bagi peneliti selanjutnya adalah menambah wawasan teori yang diperoleh serta sebagai acuan dalam meneliti lebih lanjut Analisis Pengangguran dan Perluasan Ekonomi Di Indonesia Akibat Pandemi Covid-19.

6. Kesimpulan

Based Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengalami peningkatan pengangguran selama pandemi. Situasi ekonomi yang buruk telah mendorong tingkat inflasi meningkat. Perekonomian tampaknya lebih lambat dari yang seharusnya, yang ditandai dengan pertumbuhan pengangguran yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi negara melambat karena daya beli masyarakat melemah. Daya beli penduduk sangat penting karena digunakan sebagai alat untuk mengukur biaya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur dengan perubahan produk domestik bruto (PDB) melalui PDB tingkat pengangguran. Dampak pengangguran (Maliwemu, 2021) terhadap menurunnya tingkat perekonomian negara, berdampak pada ketidakstabilan politik. Ini juga berdampak pada investor, secara sosial dan mental. Masih banyak dampak lain dari pengangguran. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan langkah preventif untuk mengatasi masalah pengangguran akibat pandemi Covid-19 di dunia kerja.

1. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 termasuk stimulus fiskal bagi pelaku ekonomi.
2. Menawarkan berbagai program konsolidasi keuangan.
3. Berikan perlindungan sosial online untuk pekerja lepas.
4. Mengutamakan pemberian insentif pendidikan melalui program kartu prakerja kepada pegawai yang terkena PHK.
5. Pemerintah mengikutsertakan pengusaha dari berbagai sektor yang bergerak di sektor riil untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap sembako yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Agarwal, R., Santoso, A., Tan, K., & Wibowo, P. (2021). McKinsey & Company : Ten ideas to unlock Indonesia's growth after Covid-19, *Political Science & International Journal*, 2-3.
- Angga Setyo Darmawan, M. N. M. (2022). Analisis tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode sebelum dan saat pandemi covid-19. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1, 2022), 111-118. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art11>
- Badan Pusat Statistik. (2022).
- Berita Resmi Statistik, 1-2. <https://www.bps.go.id/pressrelease.html>
- Dinamika, U., Jambi, B., Batang, N., & Muara Bulian, H. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi Pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19 Ayu Feranika, Dini Haryati, *Business Innovation & Entrepreneurship Journal*, Volume 2 No.3, 2-3. <https://doi.org/10.35899/biej.v2i3.154>
- Fahmi Faisol, N. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), Laju Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Nilai Impor Indonesia, *Business Innovation & Entrepreneurship Journal*, Vol 2 No.3, 3-4. <http://ekp.fe.um.ac.id/wp-content/uploads/2017/06/17.-Nazarudin-Fahmi>

- Fikri, Y. T. A. (2021). Analisis Peningkatan Angka Pengangguran akibat Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 1, 107–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/ijba.v1i2.19>
- Fitri, M. (2021), Efforts To Manage The Unemployment And Poverty Problems In Indonesia, *Advances In Social Science, Education And Humanities Research Journal*, Volume 574, 4-5.
- Franita, R., Fuady, A., Ekonomi, P., Muhammadiyah, U., & Selatan, T. (2019). Analisa Pengangguran di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 6 No 1, 3-4. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/97/97>
- <https://www.atlantis-press.com/article/125964365>
- <https://www.mckinsey.com/featured-insights/asia-pacific/ten-ideas-to-unlock-indonesias-growth-after-covid-19>